Peace, Conflict, and Development (PCD) Studies Center Analysis merupakan suatu jenis tulisan analisis mengenai suatu peristiwa atau kajian mengenai isu-isu hubungan internasional. Kajian yang terdapat dalam tulisan ini merupakan pandangan dari penulis, namun tidak merepresentasikan PCD Studies Center.

Brexit Deal: Bagaimana relasi Uni Eropa dan Inggris di Masa Depan?

Cynthia Wiranda & Salsabila

Pendahuluan

Setelah melewati negosiasi berbulan-bulan, akhirnya tercapai sebuah kesepakatan antara Uni Eropa (UE) dan Inggris yang dikenal dengan *Brexit Deal* pada 24 Desember 2020 lalu.[1] Kesepakatan ini dilakukan untuk mengatur bagaimana relasi keduanya di masa depan setelah Inggris memutuskan untuk keluar dari UE Adapun beberapa alasan yang menjadi penyebab keluarnya Inggris dari UE yaitu[2]: *Pertama*, banyak kebijakan UE yang tidak selaras dengan agenda yang dimiliki Inggris seperti kebijakan *Schengen Area*[3] dimana kebijakan ini memungkinkan warga negara anggota UE untuk mengunjungi sesama negara anggota UE tanpa harus mempunyai paspor atau visa perjalanan (*borderless)*, kemudian pada Perjanjian Maastricht (1992) dimana Inggris menolak kebijakan *European Monetary Union* mengenai integrasi keuangan Eropa dengan hanya menggunakan satu mata uang yaitu Euro. Hal ini disebabkan kegagalan Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi tahun 2008 sehingga sejak

[1] Chris Morris, "Brexit deal: What is in it? ," *BBC News*, last modified Desember 28, 2020, diakses Januari 27, 2021, https://www.bbc.com/news/55252388.
[2] Yulyan Maharta Saviar, *Mengapa Brexit? Faktor-Faktor Di Balik Penarikan Inggris Dari Keanggotaan Uni Eropa*, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, vol. 6, 2017, diakses Januari 28, 2021, https://europa.eu/european-.
[3] "Schengen Area," diakses Desember 22, 2020, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en.

tahun tersebut sampai setidaknya tahun 2013 GDP Inggris terus mengalami pertumbuhan negatif yang berdampak pada meningkatnya pengangguran[4]

Kedua, Inggris merasa bahwa beban sosial dan ekonomi yang ditanggung terhadap kebijakan UE lebih besar dan merugikan dibanding dengan negara anggota lainnya. Hal ini dapat diperhatikan dari gagalnya UE mengatur serta mengontrol kapasitas migran yang masuk ke wilayah Eropa sehingga mau tidak mau Inggris menanggung migran dalam jumlah besar yang yang berdampak negatif pada perekonomian dan kehidupan sosial di negara tersebut, migran yang datang ke Inggris berasal dari negara-negara Uni Eropa dan juga negara-negara di Timur Tengah dengan total sebanyak 38.370 migran pada tahun 2015 mengajukan suaka pada Inggris padahal Inggris telah membuat kebijakan hanya akan menerima 20.000 migran hingga tahun 2020[5]. *Ketiga,* adanya faktor yang berasal dari politik domestik Inggris dimana muncul kelompok anti Uni Eropa oleh Partai Konservatif yang kemudian merancang agenda referendum akibat persetujuan oleh Perdana Menteri Tony Blair dan Gordon Brown mengenai konstitusi Eropa dan Perjanjian Lisbon yang memberi kesan bahwa Inggris menyerahkan kedaulatannya pada UE. Pandangan ini dikenal dengan *euroscepticism.*[6] Agenda mengenai referendum pun semakin terasa ketika Partai Konservatif memenangkan pemilu di tahun 2010.

Berdasarkan alasan tersebut, kemudian Inggris memutuskan untuk melakukan referendum pada tahun 2016 dengan melibatkan 78% warga Inggris yang memiliki hak pilih dan hak suara[7]. Hasilnya, sebanyak 51,9% warga Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa sedangkan sebanyak 48.1% memilih untuk tidak meninggalkan Uni Eropa[8]. Empat tahun setelah dilakukan referendum, pada Februari 2020 Inggris secara resmi keluar dari Uni Eropa[9]. Setelah resmi keluar dari Uni Eropa, Inggris diberikan masa transisi hingga tanggal 31 Desember 2020 untuk menegosiasikan bagaimana hubungan Inggris dan Uni Eropa di masa depan khususnya dalam hubungan perdagangan dan imigrasi.

Isi Kesepakatan Brexit

Adapun beberapa poin penting yang berhasil dinegosiasikan oleh Inggris dan UE adalah[10]:

a. Mengenai Perdagangan

---

[4] Mark Briggs, "Europe 'à la carte': The whats and whys behind UK opt-outs ," *EURACTIV.com*, last modified Mei 12, 2015, diakses Januari 27, 2021, https://www.euractiv.com/section/uk-europe/linksdossier/europe-a-la-carte-the-whats-and-whys-behind-uk-opt-outs/.
[5] Ibid
[6] Peter Dorey, "Towards Exit from the EU: The Conservative Party's Increasing Euroscepticism since the 1980s" 5, no. 2 (2017): 27–40.
[7] "EU Referendum Results - BBC News," diakses Januari 28, 2021, https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results.
[8] Ibid.
[9] "Brexit: What you need to know about the UK leaving the EU - BBC News," last modified 2020, diakses Januari 28, 2021, https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887.
[10] "Brexit deal: how new EU-UK relations will affect you | News | European Parliament," diakses Januari 28, 2021, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20201203STO93023/brexit-deal-how-new-eu-uk-relations-will-affect-you.

Tidak akan ada biaya tarif tambahan pada produk yang diperdagangkan namun akan ada prosedur yang harus diikuti oleh Inggris seperti pemeriksaan keamanan serta bea cukai pada produk yang berasal dan akan dikirim ke UE maupun Inggris. Hal ini yang kemudian akan membebani sebagian dari perusahaan Inggris, dan dapat berdampak pada penambahan harga pada produk yang diperjualbelikan.[11]

b. Mengenai Kebijakkan Imigrasi

Bagi warga negara UE yang berada di Inggris serta warga negara Inggris yang berada di negara anggota UE yang sudah tinggal sebelum Januari 2021 diizinkan untuk terus tinggal dan bekerja di tempat mereka sekarang dengan syarat telah terdaftar dan diberikan izin penyelesaian oleh otoritas nasional negara anggota atau Inggris. Namun bagi warga negara Inggris yang belum tinggal di UE, hak mereka untuk tinggal dan bekerja di negara UE mana pun selain Republik Irlandia (karena Inggris memiliki perjanjian terpisah dengan mereka) tidak secara otomatis diberikan dan dapat dikenai pembatasan. Selain itu, kualifikasi mereka tidak lagi diakui secara otomatis di negara-negara UE, yang sebelumnya terjadi.[12]

c. Mengenai Kebijakan *Travel*

Bagi Warga Inggris yang akan membutuhkan visa jika berpergian ke negara anggota UE lebih dari 90 hari dalam jangka waktu 180 hari. Kemudian kartu asuransi Eropa atau *European Health Insurance Cards* (EHIC), akan tetap berlaku hingga kadaluarsa dan kemudian akan digantikan dengan *UK Global Health Insurance Card*. Serta paspor bagi hewan peliharaan tidak lagi valid, dan dibutuhkan sertifikasi kesehatan hewan peliharaan jika ingin berpergiaan ke negara anggota Britania Raya. Terakhir, akan ada tariff yang dikenakan pada *roaming* seluler antara Inggris dan EU. Namun keduanya berjanji akan bekerja sama dalam tarif yang adil dan transparan untuk *roaming* seluler internasional.[13]

d. Sumber Daya Perikanan

Pengaturan mengenai sumber daya perikanan merupakan salah satu isu yang paling diperhatikan selama negosiasi. Hal ini disebabkan sumber daya tersebut merupakan salah satu alasan mengapa Inggris ingin keluar dari UE yaitu agar dapat mengatur wilayah perairannya sendiri, Sehingga, ketika terjadi *Brexit,* Inggris menjadi negara yang merdeka dan memiliki otoritas untuk mengatur akses perairan di wilayahnya. Sesuai dengan kesepakatan, kapal UE tetap diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan Inggris. Namun 25% hasil tangkapan yang didapat UE saat berada di perairan Inggris akan diserahkan pada Armada Inggris . Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari lima tahun, di mana hak akses timbal balik ke perairan masing-masing tetap tidak berubah. Jika hal ini dilanggar, akan ada konsekuensi tarif pada ikan yang didapatkan.[14]

---

[11] Tom Edginton, "Brexit: What are the key points of the deal? ," *BBC News*, last modified Desember 30, 2020, diakses Januari 28, 2021, https://www.bbc.com/news/explainers-55180293.
[12] "Brexit deal: how new EU-UK relations will affect you | News | European Parliament."
[13] Edginton, "Brexit: What are the key points of the deal? ."
[14] "In Bullet Points: The Key Terms of the Brexit Deal Analyzed - Bloomberg," diakses Januari 28, 2021, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-24/in-bullet-points-the-key-terms-of-the-brexit-deal.

e. *Financial Service* dan Status Profesionalitas Profesi

Kesepakatan pada isu ini kurang mendapat kejelasan khususnya bagi perusahaaan keuangan. Termasuk pada keputusan ekuivalensi dimana memungkinkan perusahaan untuk menjual jasanya dari London ke negara anggota UE. Kesepakatan yang dicapai hanya berbicara mengenai ketentuan standar tentang jasa keuangan, artinya tidak mencantumkan komitmen atas akses pasar. Antara Inggris dan UE berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam pengawasan keuangan yang ditunjukkan dengan adanya nota kesepahaman pada bulan Maret mendatang.[15]

Mengenai status profesionalitas profesi seperti dokter, perawat, arsitek dan lain lain, akan mengalami perubahan dimana negara anggota UE tidak akan secara otomatis mengakui status profesionalitas profesi yang didapat di Inggris, namun status tersebut dapat dibuktikan melalui kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan standar masing masing negara UE.

f. Keamanan dan Transparansi Data

Dalam hal ini, Inggris tidak akan memiliki akses bebas/otomatis pada basis data keamanan di UE, dan harus melewati proses permintaan. Sehingga Inggris tidak lagi berkewajiban untuk mematuhi standar perlindungan data UE. Mengenai pertukaran data akan tetap dilakukan dengan metode yang sama selama Inggris tidak merubah aturan mengenai perlindungan datanya selama empat bulan. Selain itu juga Inggris tidak lagi menjadi anggota badan penegakan hukum Uni Eropa, Europol. [16]

g. Sistem Penyelesaian Sengketa

Dalam sistem penyelesaian sengketa, Inggris akan kehilangan posisinya di *European Court of Justice* (ECJ) yang merupakan pengadilan tertinggi di UE. Sehingga jika terjadi ada konflik yang tidak dapat diselesaikan antara Inggris dan Uni Eropa, konflik tersebut akan dirujuk ke pengadilan independen. Resikonya jika tidak terjadi kesepakatan melalui pengadilan independen dapat berujung pada pembatasan kerjasama serta akses satu sama lain. Namun ECJ masih berperan di Irlandia Utara dikarenakan adanya aturan perdagangan UE yang berkaitan dengan Irlandia Utara mengenai standar produk serta tarif.

Kesimpulan

Inggris sebagai negara anggota pertama yang keluar dari UE yang adalah organisasi regional dan rekan kerjasama terbesar di Eropa mencatat sejarah baru. Tercapainya kesepakatan antara Inggris dan UE mengenai hubungan kedua belah pihak dimasa depan tentu akan berdampak pada negara negara sekitarnya. Namun pertanyaan selanjutnya ialah seberapa efektif kemudian kesepakatan yang dilakukan? Dan apakah dengan keluarnya Inggris dari UE akan membawa perbaikan serta kemajuaan bagi Inggris? Pertanyaan pertanyaan ini akan

[15] Ibid.
[16] Edginton, "Brexit: What are the key points of the deal? ."

menutup tulisan dengan kesimpulan bahwa masih diperlukan pemantauan mengenai perkembangan isu *Brexit* di masa depan.